

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan seringkali dilihat dari sisi individual (Spicker, 2007). Ini berarti setiap orang atau keluarga bertanggung jawab atas kemiskinannya sendiri. Namun bagaimana jika kemiskinan juga dipengaruhi oleh kondisi eksternal yang mana orang miskin tak memiliki kuasa untuk mengubah kondisi tersebut? Pasal 34 UUD 1945 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak dipelihara oleh negara. Ini berarti, negara dan kebijakan yang diberlakukannya seharusnya berperan dalam mengentaskan kemiskinan.

Pemerintah selama ini memang lebih memandang kemiskinan secara nasional dengan angka-angka. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2013 lalu menyatakan bahwa Indonesia berhasil menekan kemiskinan sekitar 6 juta jiwa, atau 11,5% dari total penduduk miskin (“Presiden SBY Minta...,” 2013). Kebijakan pemerintah yang diampu sekarang untuk pengentasan kemiskinan melalui implementasi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi. Proyek-proyek di dalamnya berupa peningkatan ekonomi regional, kewirausahaan, dan penambahan lapangan kerja. Pertanyaannya adalah, sudah tepatkah kebijakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan berbagai konsekuensinya?

Salah satu kondisi paling parah dari kemiskinan adalah *subsistence*. *Subsistence* adalah usaha seorang miskin untuk mempertahankan pemenuhan

kebutuhan-kebutuhan paling dasarnya (sandang, pangan, papan). Ini dikarenakan kondisi finansialnya yang sedemikian buruk, sehingga misalnya, pendapatannya habis digunakan agar ia tetap dapat makan tiga kali sehari secara teratur. Kondisi ini membuat seorang miskin terpojok dan tidak punya banyak pilihan, akibat kemiskinannya. Ketika harus mempertahankan kebutuhan-kebutuhan dasarnya – yang mana tidak selalu berhasil – ia tak bisa mengakses kebutuhan-kebutuhan lain untuk meningkatkan kelayakan hidup. Menurut Scott (1976, dalam Oki, 1984), kondisi ini tak hanya ditentukan oleh kebutuhan fisiologis, namun juga kebutuhan-kebutuhan sosio-kultural.

Kebijakan pemerintah sayangnya belum tentu efektif untuk memperbaiki kondisi di atas. Clarke (2000) misalnya menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Rusia pada 1998 dalam pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan aktivitas ekonomi informal dan produksi pertanian tidak selalu efektif. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan, terlebih *subsistence*, tidak dapat dilakukan secara *top-bottom* saja. Penulis berkesempatan bertemu dengan warga miskin yang bergelut dengan *subsistence*, terutama masalah rumah pada Maret 2012. Mereka adalah warga Strenkali Surabaya yang berusaha mempertahankan rumah mereka dari ancaman penggusuran. Usaha ini terutama dengan ikut berpartisipasi dalam menentukan kebijakan pemerintah daerah terkait status tanah mereka.

Penulis bertemu Gatot Subroto, wakil sekjen PWSS (Paguyuban Warga Strenkali Surabaya). Beliau menceritakan sepak terjang warga Strenkali dalam mempertahankan rumah mereka dari penggusuran. Strenkali merupakan sebutan

untuk warga yang menghuni pinggiran sungai. Sebagian besar dari mereka merupakan keluarga dengan status sosial-ekonomi menengah bawah. Isu penggusuran berawal pada 31 Mei 2002 (Some, dkk., 2009). Pemerintah Kota Surabaya mengingatkan warga Strenkali bahwa rumah mereka akan digusur. Warga segera membentuk Jerit, Lembaga Swadaya Masyarakat yang membawahi PPTS (Paguyuban Pembela Tanah Strenkali).

Gubernur Jawa Timur kembali beri peringatan warga Strenkali Surabaya pada Januari 2005. PPTS kemudian keluar dari Jerit sebulan setelahnya dan berganti nama menjadi PWSS. PWSS segera melakukan korespondensi dengan pemerintah mengenai sebab akan dilakukannya penggusuran. Pemerintah menilai sampah warga Strenkali menyebabkan pendangkalan Sungai Surabaya dan Wonokromo (Some, dkk., 2009). Pemerintah dan PWSS kemudian membentuk badan independen untuk mengusut hal tersebut. Temuan menunjukkan bahwa pendangkalan sungai sebagian besar disebabkan limbah pabrik (Some, dkk., 2009).

Negosiasi dilakukan karena kedua pihak punya usulan yang berbeda. Pemerintah mengusulkan penggusuran karena diperlukan pengerukan dan pelebaran sungai. PWSS mengusulkan renovasi karena hanya diperlukan pengerukan sungai. Warga Strenkali tinggal menggeser letak huniannya sehingga pengeruk dapat bekerja dengan baik (Some, dkk., 2009). Negosiasi akhirnya mencapai kesepakatan hukum pada 2007. Isinya menyepakati revonasi hunian warga Strenkali, bukan penggusuran.

Pemerintah memberikan waktu lima tahun untuk melakukan perubahan besar-besaran per Oktober 2007 (Some, dkk., 2009). Perubahan ini di antaranya: (1)

meningkatkan kualitas hidup warga Strenkali, (2) memotong rumah mereka karena sebagian lahan di pinggir sungai akan dibuatkan jalan, (3) mengubah posisi rumah mereka dari membelakangi menjadi menghadap sungai, dan (4) menginisiasi sistem pengolahan limbah. Hal-hal tersebut memerlukan dana dan tenaga yang tidak sedikit. Merenovasi rumah dari bahan semi permanen menjadi bahan permanen sudah terhitung mahal. Warga Strenkali harus menabung secara kolektif, selagi membiayai kehidupan keluarga sehari-hari.

Apakah renovasi lima tahun cukup? Pemerintah nampaknya tak mengerti kesulitan finansial yang dialami warga Strenkali (Some, dkk., 2009). Kesepakatan sebelumnya juga tak membuat pemerintah urung mencari alasan baru melakukan penggusuran. Gatot Subroto menuturkan dalam wawancara terakhir (18 September 2013) apabila ancaman selalu ada sampai sekarang. Ancaman yang terutama terjadi di Surabaya ini terus dilawan PWSS (Some, dkk., 2009). Perlawanan dilakukan baik melalui media massa atau langsung mendatangi pihak bersangkutan.

Ancaman penggusuran yang selalu hadir tersebut menimbulkan dampak psikologis bagi warga Strenkali. Renovasi yang lama dan memakan banyak energi ini cukup menyurutkan harapan warga (Some, dkk., 2009). Beberapa warga sangsi dengan bertanya, bagaimana jika akhirnya hunian tetap harus digusur. Beberapa yang lain geram, mengapa rumah mereka harus dipotong.

PWSS sendiri tak berhenti memotivasi warga Strenkali. Mereka optimis bahwa suatu hari warga Strenkali dapat memenangkan pertandingan ini. Mereka sedang mengubah pandangan pemerintah dan seluruh kota Surabaya tentang

Strenkali. Perubahan itu misalnya, dari perkampungan kumuh menjadi pemenang lomba Green and Clean Village 2008. Mereka berharap kelak dapat hidup tenang tanpa ancaman penggusuran.

Seseorang bisa menilai apakah hidupnya sejahtera atau tidak. Ini disebut kesejahteraan subjektif (*subjective well-being*), karena seseorang menilai kondisi hidupnya sendiri. Seseorang bisa jadi merasa gembira sepanjang hari, namun tetap merasa tak sejahtera. Beberapa orang yang lain mengorbankan perasaan senang demi pencapaian yang lebih besar (Diener, dkk., 1999; Diener, dkk., 2003; Diener, dkk., 2004). Ini dapat dijumpai pada anak-anak yang memilih belajar tiap hari untuk mencapai prestasi.

Orang tentu dapat memiliki cara berbeda untuk menilai kesejahteraannya. Ada yang menekankan aspek afektif (perasaan senang/sedih), ada yang mengacu pada standar moral masyarakat (Suh, 1998, dalam Diener, dkk., 2004). Mereka yang tinggal dalam masyarakat yang menghargai perayaan pernikahan akan mengusahakan resepsi. Keberhasilan menyelenggarakan resepsi menjadi capaian yang menyejahterakan, berapapun biaya yang harus ditanggung. Ini merupakan suatu bentuk pertukaran yang bisa dilakukan seseorang untuk mencapai kesejahteraan (Diener, dkk., 2004).

Berdasarkan paparan di atas, peneliti mengajukan pertanyaan: apakah warga Strenkali Surabaya merasa sejahtera? Apakah mereka menganggap kehidupan mereka sekarang lebih baik setelah terancam penggusuran? Adakah hal-hal yang tetap menyejahterakan mereka selagi dirundung kemiskinan? Penulis ingin

memahami bagaimana gambaran kesejahteraan warga Strenkali Surabaya di tengah ketidakpastian.

1.2. Fokus Penelitian

Bagaimana warga Strenkali Surabaya menilai kesejahteraan hidup mereka? Penulis mengajukan beberapa pertanyaan untuk membantu memahami gambaran kesejahteraan menurut mereka: (1) Apa hal-hal dalam hidup yang signifikan bagi mereka sebagai warga Strenkali Surabaya? (2) Bagaimana hal-hal tersebut menjadi signifikan, dan bagaimana respon mereka? Serta (3) bagaimana hal-hal tersebut memengaruhi kesejahteraan subjektif warga Strenkali Surabaya?

1.3. Signifikansi dan Keunikan Penelitian

Kemiskinan seringkali diasumsikan sebagai kehidupan yang penuh dengan kesulitan dan ketidakberdayaan (Biswas-Diener & Diener, 2006). Ini benar, namun asumsi ini saja dapat membuat hal-hal lain tak terungkap. Ini menjadi perhatian utama agar penulis tak membayangkan jawaban tunggal atas kemiskinan.

Tema kemiskinan selama ini lebih banyak diteliti secara kuantitatif (Spicker, 2007). Penelitian-penelitian tersebut lebih ditujukan untuk memperlihatkan standar tertentu, misalnya indikator kebahagiaan nasional (Diener, 2000). Hanya sedikit penelitian untuk melihat keterkaitan kemiskinan dan kesejahteraan secara mendalam (Biswas-Diener & Diener, 2001). Ini termasuk melihat kemiskinan dengan sudut pandang berbeda dari stereotip seperti ketidakberdayaan.

Penulis ingin memahami hal ini lebih lanjut secara kualitatif. Penelitian kualitatif mengenai kemiskinan sendiri punya manfaat berbeda. Ia mencoba memahami bagaimana kemiskinan terjadi dan pengaruhnya pada mereka yang

mengalaminya (Spicker, 2007). Hal ini dapat melengkapi urgensi meneliti efek kesejahteraan pada kondisi kemiskinan warga (Biswar-Diener & Diener, 2001). Ini dilakukan dengan memahami hal-hal positif yang dimiliki warga miskin. Pemahaman yang lebih baik tentang hubungan kompleks keduanya dapat membantu penyusunan kebijakan dan intervensi. Ini ditujukan untuk peningkatan kondisi ekonomi dan psikologis warga miskin (Biswar-Diener & Diener, 2001).

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran kesejahteraan hidup menurut warga Strenkali Surabaya.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat teoretis

Usaha mempertahankan hidup dalam kondisi minimum dapat menjadi petunjuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Ini memperlihatkan kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar seseorang dapat menilai dirinya sejahtera.

1.5.2. Manfaat praktis

Penelitian ini menjelaskan usaha warga Strenkali Surabaya mempertahankan hidup mereka dalam kondisi minimum. Pengetahuan tentang hal ini bisa menjadi rujukan, terutama kepada pemerintah. Ini terutama terkait kebijakan atas status tanah yang sebenarnya bukan milik warga Strenkali Surabaya.